

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH 2022)

Mike Fernisia<sup>1</sup>, Sony Fransisco Siboro<sup>2</sup>, Paulina Putri Ningrum<sup>3</sup>, Salsabilla Dwiyanti<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Depok, Indonesia

63210455@bsi.ac.id<sup>1</sup>, sonny.sof@bsi.ac.id<sup>2</sup>, 63210443@bsi.ac.id<sup>3</sup>, 63210441@bsi.ac.id<sup>4</sup>

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan akuntansi basis akrual dalam pelaporan keuangan sektor publik terutama pada yayasan. Untuk melakukan permasalahan terkait, penulis menggabungkan metodologi kualitatif dengan tinjauan literatur (*literature review*) dari penelitian terdahulu. Temuan studi ini menunjukkan dampak signifikan akuntansi berbasis akrual terhadap peningkatan transparansi, penerapan, dan kebenaran laporan keuangan di sektor publik.

**Kata Kunci:** Akuntansi basis akrual; Laporan keuangan; Sektor publik; Transparansi; Yayasan

ABSTRACT

*The main objective of this research is to find out how the application of accrual-based accounting in public sector financial reporting has influenced the foundation in particular. To do this, the author combines qualitative methodology with a literature review from previous research. The findings of this study show the significant impact of accrual-based accounting on improved transparency, application, and accuracy of financial statements in the public sector.*

**Keywords:** *Accrual-based accounting; Accuracy; Financial statements; Transparency; Public sector*

---

Histori artikel:

Diunggah: 27-05-2024

Direview: 05-06-2024

Diterima: 18-06-2024

Dipublikasikan: 20-06-2024



---

\* Penulis korespondensi



## PENDAHULUAN

Istilah "sektor publik" mencakup berbagai definisi karena cakupannya yang luas. Setiap disiplin ilmu, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi, menawarkan perspektif dan definisi yang berbeda. Dalam konteks ekonomi, sektor publik mengacu pada entitas yang menyediakan barang dan layanan publik, agar dapat memenuhi keperluan dan hak-hak masyarakat. Tujuan utama organisasi sektor publik bukanlah untuk memaksimalkan laba tetapi memberikan pelayanan publik sebaik mungkin serta memiliki tanggungjawab kepada publik dan parlemen, termasuk badan legislatif nasional dan lokal. (Mardiasmo, 2021).

Akuntansi adalah aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Tujuan akuntansi difokuskan untuk mencapai hasil yang spesifik, yang bermanfaat. Akuntansi diterapkan di sektor swasta dan publik untuk berbagai tujuan. Akuntansi sektor publik merujuk pada sistem akuntansi yang umumnya diterapkan oleh entitas publik atau pemerintah. (Mardiasmo, 2021). Lembaga-lembaga publik umumnya diharapkan untuk mengelola laporan keuangannya dengan transparan, sehingga Akuntansi Sektor Publik memiliki peran signifikan dalam sektor publik. Ada tiga aspek utama yang difokuskan dalam Akuntansi Sektor Publik, diantaranya: sumber penyedia informasi, kontrol manajemen, dan akuntabilitas. Hal ini merupakan instrumen penting bagi manajemen pemerintah sebagai sarana pemberi informasi kepada publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi dimanfaatkan untuk mengelola proses manajemen, yang mencakup perencanaan strategis, pengembangan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan hasil kinerja. (Mardiasmo, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari (Pranata *et al.*, 2023), laporan keuangan dapat dicirikan sebagai laporan tertulis yang berisi bagaimana tingkat perkembangan dan aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dalam masa tertentu. Laporan keuangan sangat diperlukan keberadaannya oleh pihak pemangku kepentingan. Laporan keuangan ini menjadi alat pertanggungjawaban mengenai sumber daya yang terpakai.

Basis Akrua adalah prinsip fundamental dalam pencatatan akuntansi. Basis Akrua merupakan teknik akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan, memberikan informasi yang komprehensif dengan menangkap semua arus masuk dan keluar sumber daya. Tujuan utama penggunaan akuntansi sektor publik berdasarkan basis akrua adalah untuk menentukan biaya layanan dan membebaskan biaya layanan. Dengan kata lain, akuntansi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan menentukan biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat untuk layanan tersebut. (Asmira, 2021).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 Ayat (1) menyatakan "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun". Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004 menegaskan dengan menyatakan bahwa ketetapan mengenai pengakuan serta perhitungan pendapatan dan biaya dengan basis akrua dilakukan secepatnya dan tidak lebih lambat dari Tahun Anggaran (TA) 2008. Akan tetapi, semasa belum dilaksanakannya penggunaan pengakuan serta perhitungan pendapatan dan biaya dengan basis akrua, penggunaan pengakuan dan pengukuran dengan basis kas masih diperbolehkan (*PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022 . TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT , 2022*)

Pada mulanya sektor publik menggunakan sistem akuntansi dengan basis kas, tetapi semenjak PP Nomor 24 Tahun 2005 mengganti basis pencatatan kas menuju akrual, sistem akuntansi berbasis kas sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sekarang sudah banyak sektor publik yang menggunakan berbasis akrual, seperti pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih.

Berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengaplikasian akuntansi dengan basis akrual ditangguhkan prosesnya hingga tahun 2015. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN dan diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Menurut standar tersebut, pemerintah pusat diwajibkan untuk menetapkan kebijakan akuntansi dengan basis akrual sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (*PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022 . TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT , 2022*)

Dengan demikian, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berpengaruh pada pelaporan keuangan sektor publik dalam studi kasus Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Tahun 2022.

Lasabuda et al. (2020) yang melakukan penelitian pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan penerapan pencatatan akuntansi basis akrual telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan dalam penyusunan dan pelaporan karena didukung oleh sistem yang lebih koheren antar pegawai akuntansi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sari & Wahyuni (2022), menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar kepada karyawan bidang keuangan dan telah diuji dengan metode uji analisis deskriptif dinyatakan *valid*, sehingga penggunaan standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Maksud dari adanya penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana akuntansi basis akrual mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada badan publik. Penulis berharap dengan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Tahun 2022) dapat memberikan wawasan mendalam mengenai korelasi antara akuntansi basis akrual dan laporan keuangan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Akuntansi

#### *a. Definisi Akuntansi*

Menurut Azwar et al. (2022), Akuntansi merupakan seni pencatatan transaksi keuangan yang dalam prosesnya melibatkan segala bentuk bukti transaksi dan setelah itu dilakukan proses mengidentifikasi, mengukur, dan pencatatan atas semua transaksi guna menghasilkan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Dalam pengertian lain, akuntansi dapat diartikan sebagai ilmu yang mendasari proses berpikir untuk menghasilkan susunan atas prinsip, metode, standar serta prosedur pelaporan keuangan. Dengan pengetahuan ini, dapat dikatakan akuntansi sebagai serangkaian proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan yang dilakukan secara

runtut dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan persyaratan akuntansi yang relevan (Rahayu, 2020).

#### **b. Bidang-bidang Akuntansi**

Secara umum, ada 4 jenis akuntan diantaranya akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan akuntan internal. Karena pengelompokan inilah akuntansi terbagi menjadi beberapa bidang dan focus berbeda. Menurut Wibawa (2020) disebutkan ada beberapa bidang-bidang dalam akuntansi:

- 1) Akuntansi keuangan (*Financial accounting*) adalah cabang akuntansi yang fokus utamanya adalah pada pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Akuntansi manajemen, kegiatannya mencakup perencanaan anggaran dan pemecahan masalah serta penemuan solusi atas masalah spesifik yang dihadapi manajemen;
- 3) Akuntansi pemerintahan (*Governmental accounting*), bidang ini bertugas pada Lembaga pemerintahan untuk melaporkan dan mengelola administrasi keuangan negara dalam berbagai aspek melalui data pengeluaran dan pendapatan kas negara.

#### **Sektor Publik**

Yang biasa diketahui, istilah “publik” memiliki berbagai macam pengertian. Hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah yang dicakup dalam kata publik. Setiap kelompok ilmu seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial akan memiliki perspektif dan sifat yang tidak sama tergantung perspektif seseorang yang mendefinisikannya. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai suatu badan atau organisasi yang aktivitasnya berkaitan erat dengan perolehan barang atau jasa dalam tujuan pemenuhan kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2021).

Faktor-faktor penghambat bergeraknya sektor publik dalam lingkungan yaitu dikarenakan oleh faktor berikut:

- a) Faktor ekonomi (Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan infrastruktur);
- b) Faktor budaya (Keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa);
- c) Faktor politik (Hubungan negara dan Masyarakat, ideologi negara, dan kelembagaan);
- d) Faktor demografi.

#### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo dalam Indrayani mengatakan “akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik”. Indra Bastian dalam Indrayani (n.d.) menyatakan akuntansi sektor publik sebagai susunan metode dan analisis akuntansi yang diimplementasikan pada lembaga pemerintahan beserta departemennya guna penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan akuntansi sektor publik merupakan serangkaian cara yang tersusun secara sistematis yang digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi sektor pemerintah sebagai pengendalian manajemen artinya manajer akan memperoleh informasi dalam hal laporan pertanggungjawaban aktualisasi sumber daya pada tiap-tiap divisinya. Akuntansi sektor publik menyediakan setiap informasi yang akan digunakan untuk mengendalikan suatu organisasi agar tepat guna dalam penggunaan sumber daya.

## **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP) adalah seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan untuk merangkai dan menampilkan laporan keuangan entitas pemerintah. Laporan-laporan ini mencakup Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, CaLK, Laporan perubahan ekuitas, LRA, dan Laporan Perubahan Stok Aset dan Liabilitas (SAL).

Akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual*) dalam PP No. 71 Tahun 2010 diharuskan untuk digunakan pada seluruh pemerintahan pusat dan daerah dan paling lambat pada akhir tahun 2015.

## **Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Niu dkk dalam Rosana & Bharata (2023), penyusunan laporan keuangan bertujuan dalam menyajikan data penting mengenai situasi keuangan suatu entitas organisasi pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan untuk sektor publik menunjukkan situasi untuk membangun akuntabilitas sektor publik karena mencerminkan posisi keuangan yang dihasilkan dari berbagai transaksi yang telah dilakukan. Manajemen sektor publik yang menyebarkan informasi kepada publik, termasuk data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan terkena dampak dari tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas dan pemeriksa, anggota masyarakat, dan wakil rakyat menganggap laporan keuangan ini informatif atau bermanfaat.

### **a. Tujuan Pelaporan Keuangan Sektor Publik**

Kawatu (2019) menyatakan bahwa setelah dianalisis secara menyeluruh, data keuangan yang ditemukan di surat kabar dan situs web pemerintah daerah biasanya memberikan banyak informasi yang berguna. Inti utama dari data keuangan yang telah dirangkum, dikategorikan, dan disusun oleh organisasi adalah isi dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Data keuangan ini memberikan informasi mengenai jumlah modal dan sumber daya moneter pemerintah, mutasi situasi sumber daya moneter, liabilitas, dan status modal pemerintah. Selain itu, laporan keuangan juga menampilkan bagaimana entitas membiayai operasinya dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, rincian ini akan membantu pengguna dalam mengevaluasi akuntabilitas serta membuat keputusan terkait isu-isu permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi.

### **b. Komponen Penting Laporan Keuangan Sektor Publik**

Penyusunan laporan keuangan pemerintah sektor publik pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertulis dalam PP no. 71 tahun 2010 (Sitepu et al., 2024). Terdapat komponen penting yang wajib dimuat dalam penyusunan Laporan keuangan sektor publik, di antaranya :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : memuat informasi rinci tentang kondisi keuangan mulai dari sumber perolehan hingga penyaluran dana yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah dengan membandingkan anggaran dan realisasi. LRA mencakup pendapatan LRA, surplus/defisit LRA, kebutuhan biaya, pemindahan kas, dan Pembiayaan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) : membandingkan perubahan saldo anggaran lebih antara periode pelaporan saat ini dengan periode sebelumnya.
- 3) Neraca : menyajikan informasi kondisi keuangan yang mencakup penilaian aset, kewajiban atau utang, dan modal pada suatu periode akuntansi.

- 4) Laporan Operasional (LO) : menyajikan informasi terkait dengan aktivitas operasional keuangan. LO mencakup pendapatan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK) : menyediakan informasi penting mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah pusat maupun daerah.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) : memberikan informasi tentang naik dan turunnya ekuitas dengan membandingkan ekuitas periode sebelumnya dengan periode sekarang.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) : berisi penjelasan mengenai pelaporan informasi keuangan dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

## **Akuntansi Yayasan**

### **a. Pengertian Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang keberadaannya didirikan oleh perorangan atau badan hukum untuk kepentingan umum dan tidak untuk mengambil keuntungan. Yayasan didirikan dengan berbagai tujuan seperti sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan memiliki kekayaan sendiri dan seluruh aktivitas yang dilakukannya demi menggapai tujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yayasan juga memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai badan hukum independen dari pendirinya (Wasisto, 2023).

### **b. Bentuk Yayasan**

Dalam buku yang disusun oleh Wasisto (2023) yayasan memiliki beberapa bentuk, berikut adalah bentuk yayasan umum yang bisa ditemukan di Indonesia:

- 1) Yayasan Sosial : yayasan yang didirikan untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk orang sakit, orang miskin, dan yatim piatu.
- 2) Yayasan Pendidikan : yayasan yang menyelenggarakan dan membantu kegiatan pendidikan, baik formal maupun non-formal.
- 3) Yayasan Kesehatan : yayasan yang menyediakan layanan kesehatan dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit.
- 4) Yayasan Budaya : yayasan yang melestarikan dan mengembangkan budaya lokal atau nasional seperti museum, taman budaya, dan galeri seni.
- 5) Yayasan Lingkungan : yayasan yang mendukung, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan hidup, seperti yayasan yang berfokus pada penghijauan, pelestarian hewan, dan penanggulangan bencana.
- 6) Yayasan Keagamaan : yayasan yang membantu kegiatan keagamaan seperti yayasan yang mengelola tempat ibadah.
- 7) Yayasan Olahraga : yayasan yang mendukung dan memajukan olahraga di Indonesia, seperti yayasan pusat latihan atlet atau yayasan yang menyelenggarakan event olahraga.
- 8) Yayasan Penelitian : yayasan yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah, sosial, dan budaya.

### **c. Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan Yayasan**

Anand dalam Fitri (2023) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan yayasan belum terkait dengan standar akuntansi yang benar. Pencatatan tidak dilakukan melalui proses siklus akuntansi, yaitu pengumpulan bukti transaksi, pencatatan bukti akuntansi, membuat buku besar, dan mempertahankan neraca saldo pada akhir periode.

Tujuan utama laporan keuangan nirlaba adalah sama, menurut ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, tujuan laporan tersebut adalah menyajikan informasi yang signifikan mengenai kegiatan organisasi. Kegiatan utama dari organisasi nirlaba adalah tidak mencari keuntungan. Menurut ISAK No. 35 dalam Fitri (2023) laporan keuangan organisasi nirlaba harus disusun berdasarkan beberapa komponen penting, termasuk neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta lampiran laporan keuangan. Dengan demikian, organisasi nirlaba diharuskan untuk menyajikan informasi keuangan yang lengkap guna membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang baik.

- 1) Neraca: berisi informasi mengenai aset, utang, dan kekayaan bersih. Anggota komunitas nirlaba dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kapasitas organisasi nirlaba untuk memenuhi kewajiban eksternal dan memberikan jasa secara berkesinambungan dengan menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan keuangannya.
- 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif: bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penghasilan komprehensif lain serta jumlah surplus atau defisit. Laporan ini mencakup semua konsekuensi dari transaksi dan aktivitas lain yang dapat mengubah tingkat pendapatan, penggunaan sumber daya, dan hubungan antara berbagai aktivitas dan pengeluaran.
- 3) Laporan Perubahan Aset Bersih: berisi informasi mengenai pos-pos laba rugi komprehensif berdasarkan kategori aset bersih.
- 4) Laporan Arus Kas: memberikan rincian mengenai jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Isi laporan ini sangat membantu untuk membangun kas dan membuat perbandingan antara nilai arus kas periode sekarang dari berbagai perusahaan.
- 5) Lampiran Rekening Tahunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Pedoman dalam penyusunan laporan keuangan tambahan. Menurut Yanuarisa dalam Sri Adella Fitri, CaLK menawarkan informasi keuangan yang disarankan untuk dipublish oleh organisasi nirlaba.

### **Basis Akuntansi**

Dalam proses akuntansi salah satu yang terpenting yaitu pengakuan (*recognition*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses untuk menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa memenuhi syarat untuk dicatat dalam buku akuntansi, sehingga bisa menjadi bagian dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, atau pembiayaan yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan entitas terkait (Handayani, 2019). Dapat disimpulkan bahwa penentuan waktu pencatatan suatu transaksi sangat penting, karena memerlukan dasar akuntansi yang akan diterapkan ketika transaksi tersebut dicatat.

Basis akuntansi adalah sekumpulan standar yang menentukan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk pelaporan keuangan. Dengan kata lain yaitu seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana perusahaan melaporkan informasi keuangan. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan suatu perusahaan lengkap, konsisten, dan dapat diandalkan. Basis Kas (*Cash Basis*) dan Basis Akrua (*Accrual Basis*) merupakan dua basis akuntansi yang paling umum digunakan.

Tetapi pada sektor publik basis akuntansi yang sering digunakan meliputi : Basis Kas (*Cash Basis*), Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash*), Basis Kas menuju Akrual dan Basis Akrual (*Accrual Basis*).

**a. Basis Kas (*Cash Basis*)**

Basis kas adalah pendekatan akuntansi di mana transaksi dicatat atau diakui saat uang diterima atau dibayarkan. Transaksi hanya dicatat berdasarkan uang kas yang terlibat, sedangkan jika tidak ada transaksi uang kas yang terlibat, maka transaksi tersebut tidak dicatat (Handayani, 2019). Misalkan perusahaan menjual barang, tetapi pembayarannya baru dilakukan minggu depan, pendapatan tersebut tidak akan dicatat sebelum uangnya benar-benar sudah diterima.

Kelebihan menggunakan basis kas yaitu menggambarkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif, selain itu dapat mudah dipahami. Namun pencatatan menggunakan basis kas juga mempunyai kekurangan, artinya tidak mencerminkan kinerja sebenarnya dari perusahaan serta sulit untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan akurat

**b. Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash*)**

Dalam butir (12) dan (13) Lampiran XXIX tentang Kebijakan Akuntansi, basis kas modifikasi (*modified cash*) adalah “gabungan dari basis kas dengan basis akrual. Pada basis kas, transaksi penerimaan atau pengeluaran baru dicatat saat uang diterima atau dibayar, lalu pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Oleh karena itu, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual” (Handayani, 2019).

Oleh karena itu, perbedaan antara basis kas dan basis kas modifikasi yaitu basis kas hanya mencatat transaksi berdasarkan perubahan kas, sedangkan basis kas modifikasi, mencatat transaksi berdasarkan perubahan kas dan juga berdasarkan terjadinya transaksi.

**c. Basis Kas Menuju Akrual**

Basis akuntansi kas menuju akrual merupakan sistem pencatatan yang diciptakan di Indonesia sebelum diperkenalkannya basis akuntansi akrual penuh, yang merupakan hasil dari inovasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, langkah dari basis kas menuju akrual adalah “ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual”.

**d. Basis Akrual (*Accrual Basis*)**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1, basis akrual ialah “pencatatan yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi” (Handayani, 2019).

Basis akrual adalah suatu pendekatan akuntansi yang mencatat transaksi dan peristiwa pada saat terjadi, mencakup semua aktivitas bisnis, berbeda dengan basis kas yang hanya

mencatat transaksi ketika uang diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, basis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat dan lengkap mengenai kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang belum diterima atau dibayarkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu metode kualitatif. Erickson dalam Anggito & Setiawan (2018) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan secara naratif suatu kegiatan yang akan dilaksanakan serta akibat dari perilaku yang dilakukan.

Peneliti juga menggunakan pendekatan *literature review* untuk mengumpulkan dan menganalisis beberapa sumber data. Data-data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data sekunder dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta laporan finansial dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian sebelumnya pada satuan kerja KPPN yang dilakukan oleh Suryaningsih & Hidayat (2020), dikatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya keterkaitan dan keterpengaruh kualitas laporan keuangan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa satuan kerja pada wilayah tersebut telah secara efektif menerapkan Standar Akuntansi Publik sesuai dengan UU no. 17 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010.

Menurut (Satrio & Wijayanti, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi basis akrual memengaruhi tingkat kerja pemerintah di sektor publik. Berdasarkan penelitiannya, pengaruh ini disebabkan karena basis akrual dapat menghasilkan informasi yang signifikan bagi pengguna.

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh Sari & Wahyuni (2022), diperoleh hasil bahwa angket yang telah diberikan kepada karyawan pada bagian keuangan dinyatakan telah sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual. Penelitian ini menunjukkan hasil yang positif ketika dibandingkan dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, analisis yang telah dilakukan oleh Sari & Wahyuni (2022) akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi atau badan usaha.

Pengaruh penerapan basis akrual pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memiliki berbagai hasil yang sangat positif, seperti :

### **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatnya akurasi dan transparansi laporan keuangan, Karena semua pendapatan dan biaya, langsung disetujui dan dicatat pada saat transaksi terjadi, tidak menunggu penerimaan atau pembayaran kas, maka dari itu dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Sehingga Laporan keuangan tahun 2022 dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih lebih detail, karena mencerminkan seluruh aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas dengan akurat.

Memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan, jika laporan keuangan suatu yayasan lebih akurat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap donatur, pemerintah dan

masyarakat umum. Dapat dilihat laporan keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih tahun 2022 penerimaan jumlah donasi lebih besar dibandingkan tahun 2021, hal tersebut menunjukkan peningkatan keyakinan para donatur terhadap pengelolaan keuangan yayasan.

### **Peningkatan Efisiensi**

Efisiensi laporan keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih otomatis meningkat, karena akuntansi basis akrual melakukan pencatatan transaksi secara *real-time* sehingga mengurangi penundaan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu sebagian besar sistem akuntansi basis akrual sudah menggunakan perangkat lunak akuntansi sehingga dapat mengurangi beban kerja manual.

### **Peningkatan Pengawasan**

Semua transaksi yang ada pada laporan keuangan dicatat dengan tepat waktu sehingga pengawasan internal dapat lebih efektif karena mudah untuk mendeteksi dari awal jika terjadi kesalahan atau kecurangan.

### **SIMPULAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelaporan sektor publik Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih pada tahun 2022 akan dipengaruhi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan organisasi sektor publik lainnya berkinerja lebih baik ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, dan kualitas pelaporan keuangan mereka juga meningkat.

Penerapan basis akrual dapat menaikkan tingkat transparansi, akurasi, dan akuntabilitas suatu laporan keuangan dan hal tersebut akan memudahkan organisasi untuk mendapatkan kepercayaan donatur dan masyarakat umum. Selain itu, pencatatan secara *real-time* dan penggunaan perangkat lunak akuntansi berbasis akrual dapat mengurangi penundaan dan beban kerja manual, sehingga terjadinya peningkatan yang efisien dan efektivitas pada pengawasan internal yang membantu dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan lebih awal.

Saran dari peneliti yaitu diharapkan organisasi sektor publik lainnya menggunakan akuntansi berbasis akrual agar mendapatkan manfaat dari segi transparansi dan akurasinya. Sebuah laporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan rasa percaya donatur, pemerintah, serta masyarakat. Selain itu, peneliti juga menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan analisis yang lebih luas lagi tentang praktik akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Asmira, S. (2021). *AKRUAL BASIS DALAM METAFORA AMANAH; PERWUJUDAN INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada BKAD Kabupaten Sinjai)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Azwar, K., Mulyana, A., Himawan, I. S., Astuti, Juwita, R., Yuniawati, R. I., Purwatiningsih, Dewi, K. I. K., Mirayani, L. P. M., Widhiastuti, N. L. P., Wahyuni, P. D., Bagiana, I. K., & Sumartono. (2022). *PENGANTAR AKUNTANSI* (Suhardi & E. Susanti, Eds.). CV. Tohar Media.
- Fitri, S. A. (2023). *AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA*. In M. R. Kurnia (Ed.), *AKUNTANSI LEMBAGA PUBLIK*. Sada Kurnia Pustaka.
- Handayani, M. (2019). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK : DILENGKAPI 100 SOAL LATIHAN DAN JAWABAN* (A. Pratomo, Ed.). POLIBAN PRESS.
- Indrayani. (n.d.). *MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*.
- Kawatu, F. S. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK* (G. D. Ayu, Ed.). Deepublish Publisher.
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAMPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167–174.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed.). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022 . TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT* . (2022). jdih.kemenkeu.go.id.
- Pranata, M. G., Anggarani, A., & Aryanindita, G. P. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA UNTUK TAHUN 2018-2021. *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*, 4(2), 189–204.
- Rahayu, D. P. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTREN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEAUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DINAS PERIKANAN KAB.SUBANG). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 87–96.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. *JURNALKU*, 3(1).
- Sari, A., & Wahyuni, A. (2022). ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN KINERJA SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 7(2), 59–66.
- Satrio, A. A., & Wijayanti, N. A. (2020). HUBUNGAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN KINERJA PEMERINTAH DI INDONESIA. *Journal Publicuho*.
- Sitepu, H. V., Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, Ungkari, M. D., Mila, S., Riwayati, A., Sari, K. R., Wibowo, A. S., & Bahiyah Khariidatul. (2024). *BUKU AJAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suryaningsih, M., & Hidayat, M. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN(Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke). *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(3), 175–185.
- Wasisto, A. W. (2023). *AKUNTANSI YAYASAN*.
- Wibawa, E. S. (2020). *BELAJAR PEMULA SISTEM DASAR AKUNTANSI DAN LAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN* (Z. Mustofa, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik.